

**ANALISIS PERMINTAAN DAN PENAWARAN BERAS
DI PROVINSI SUMATERA UTARA**

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister Manajemen Agribisnis (M.MA)
Pada Program Pascasarjana Universitas Medan Area**



Oleh :

**WAHIDIN TARIGAN
NPM 091802005**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCA SARJANA
MAGISTER MANAJEMEN AGRIBISNIS
M E D A N
2012**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/3/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)10/3/23

**ANALISIS PERMINTAAN DAN PENAWARAN BERAS
DI PROVINSI SUMATERA UTARA**

TESIS



Oleh :

**WAHIDIN TARIGAN
NPM 091802005**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCA SARJANA
MAGISTER MANAJEMEN AGRIBISNIS
M E D A N
2012**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/3/23

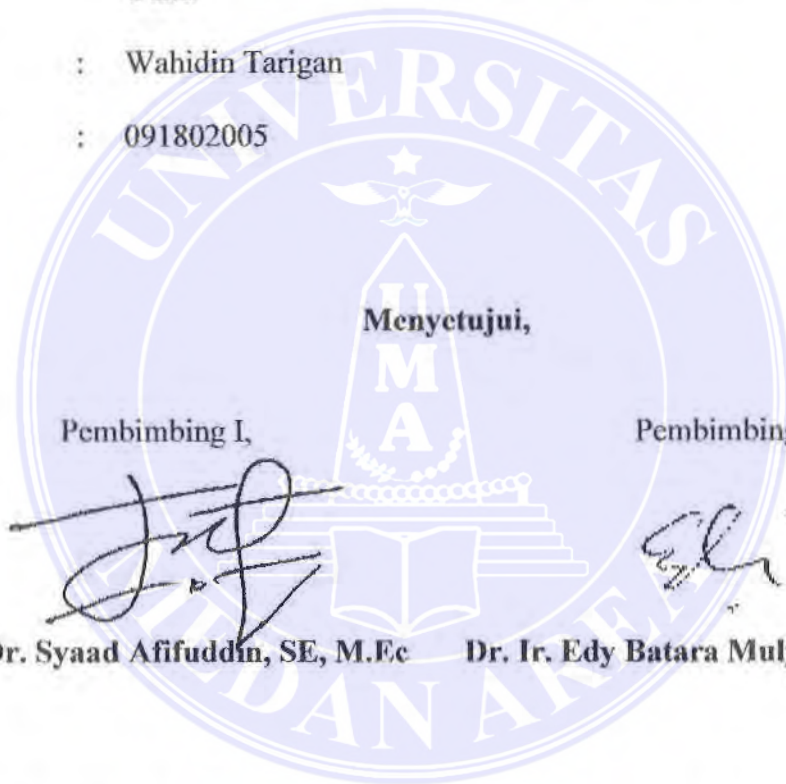
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)10/3/23

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER AGRIBISNIS**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Analisis Permintaan Dan Penawaran Beras Di Provinsi Sumatera Utara
Nama : Wahidin Tarigan
NPM : 091802005



Pembimbing I,

Pembimbing II,

Prof. Dr. Syaad Afifuddin, SE, M.Fc

Dr. Ir. Edy Batara Mulya Siregar, M.Si

Ketua Program Studi
Magister Agribisnis

Direktur

Ir. E. Harso Kardhinata, M.Sc

Prof. Dr. Ir. Retna Astuti K, MS

RINGKASAN

Penelitian ini menganalisis permintaan dan penawaran beras, serta melihat pengaruh variabel harga dan non harga terhadap permintaan, penawaran beras di Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan data sekunder runtun waktu (*time series*) yang bersumber dari lembaga, dinas atau instansi yang berwenang, terutama Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara, Bulog Divisi Regional Sumatera Utara dan lembaga-lembaga terkait lainnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa produksi beras sangat dipengaruhi oleh harga beras dan harga pupuk, kenaikan dalam harga akan meningkatkan jumlah penawaran beras di masa yang akan datang, sedangkan kenaikan dalam harga pupuk akan mengurangi jumlah penawaran beras, karena pupuk merupakan komponen input yang jumlahnya relatif besar, sementara harga barang substitusi tidak berpengaruh terhadap penawaran beras. Dilihat dari elastisitasnya baik harga ekspektasi maupun harga input bersifat inelastis dari segi permintaan, variabel harga beras dan harga barang substitusi tidak signifikan pengaruhnya terhadap permintaan beras, naik turunnya kedua variabel tersebut tidak akan menyebabkan berubahnya jumlah permintaan, sedangkan pendapatan dan jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap permintaan beras, bila dilihat dari elastisitasnya baik harga beras maupun pendapatan keduanya bersifat inelastis.

Hasil penelitian ini merekomendasikan bahwa berkaitan dengan konflik kepentingan antara konsumen dan produsen dalam konteks harga beras, dimana harga yang rendah bagi konsumen memiliki arti positif karena meningkatkan daya beli, sedangkan bagi produsen memiliki arti negatif karena menurunkan pendapatan dan sekaligus daya beli, demikian juga sebaliknya. Untuk itu dibutuhkan manajemen stok yang mampu menciptakan stabilitas harga dengan karakteristik di satu sisi tidak memberatkan konsumen namun disisi lain masih menguntungkan produsen. Instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah dalam hal ini adalah kombinasi manajemen stok dengan penetapan harga dasar gabah (*floor price*) dan penetapan harga atap (*ceiling price*) yang wajar baik untuk kepentingan produsen maupun kepentingan konsumen.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis sampaikan kepada Allah, SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan tesis ini berjudul “Analisis Permintaan Dan Penawaran Beras di Provinsi Sumatera Utara” dapat diselesaikan. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk penyelesaian studi pada Program Pasca Sarjana Magister Agribisnis Universitas Medan Area.

Ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada bapak-bapak Pembimbing dan Responden serta pihak terkait lainnya yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini, sebagai berikut :

1. Prof. Dr. Syaad Afifuddin, SE, M.Ec selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Ir. Edy Batara Mulya Siregar, MS selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, petunjuk dan saran-saran dalam pelaksanaan penelitian serta penyusunan tesis ini.
2. Bapak Kepala Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara yang telah memberikan ijin serta dukungan kepada penulis untuk Tesis ini.
3. Para Staff Kepala Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara yang telah memberikan ijin serta dukungan kepada penulis untuk Tesis ini.
4. Bapak – bapak dan ibu responden yang telah membantu penyelesaian tesis ini.
5. Civitas akademika Program Pasca Sarjana Magister Agribisnis Universitas Medan Area yang telah membantu penulis selama menempuh pendidikan di Program Pasca Sarjana MA –UMA.

Ucapan terima kasih yang sangat tulus penulis ucapkan kepada keluarga tercinta atas segala dukungan dan pengorbanannya selama penulis menempuh Program Pasca Sarjana Magister Agribisnis Universitas Medan Area.

Disadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik sangat kami harapkan guna penyempurnaannya. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagaimana yang diharapkan.



Penulis,

Wahidin Tarigan

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan	i
Ringkasan.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel.....	vi
Daftar Gambar	vii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan Masalah	14
1.3. Tujuan Penelitian	15
1.4. Manfaat Penelitian.....	15
1.5. Hipotesis	16
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	17
2.1. Teori Penawaran	17
2.2. Teori Permintaan	21
2.3. Penelitian Sebelumnya.....	25
BAB III. BAHAN METODE PENELITIAN.....	29
3.1. Bentuk Penelitian.....	29
3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	29
3.3. Teknik Pengumpulan Data	29
3.4. Difinisi Konsep dan Difinisi Operasional.....	29
3.5. Teknik Analisis Data	30
3.5.1. Fungsi Permintaan	31
3.5.2. Fungsi Penawaran.....	32

BAB IV. GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN.....	34
4.1. Gambaran Umum.....	34
4.2. Perkembangan Konsumsi Beras	36
BAB V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
5.1. Hasil Penelitian.....	41
5.1.1 Perkembangan Produksi Padi	41
5.1.2 Perkembangan Konsumsi Beras	43
5.1.3. Pertumbuhan Ekonomi	44
5.1.4. Perkembangan Jumlah Penduduk.....	47
5.1.5. Perkembangan Harga Beras dan Gabah	49
5.1.6. Perkembangan Harga Pupuk Dan Terigu.....	55
5.2. Pembahasan	57
5.2.1. Fungsi permintaan Beras	58
5.2.2. Fungsi Penawaran Beras.....	64
5.2.3. Kebijakan Stabilisasi Harga Beras	71
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	77
6.1. Kesimpulan.....	77
6.2. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Luas panen, produksi dan rata-rata produksi padi sawah dan ladang di Sumatera Utara Tahun 1997-2010	6
Tabel 2. Perkembangan Harga Beras, Harga Gabah, dan Konsumsi beras Perkapita di Propinsi Sumatera Utara Tahun 1997-2010.....	7
Tabel 3. Produksi Padi dan Konsumsi Beras Propinsi Sumatera Utara Tahun 1995-2010	42
Tabel 4. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Propinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2010 (dalam persentase)	46
Tabel 5. Harga Eceran Beras dan Harga Gabah Propinsi Sumatera Utara Tahun 1995-2010 (dalam rupiah).....	51
Tabel 6. Perkembangan Harga Pupuk dan Terigu Propinsi Sumatera Utara Tahun 1995-2010 (dalam rupiah).....	56
Tabel 7. Estimasi Fungsi Permintaan Beras.....	60
Tabel 8. Estimasi Fungsi Penawaran.....	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Grafik Perkembangan Harga Beras Dan Harga Gabah di Propinsi Sumatera Utara Tahun 1996-2005.....	12
---	----



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Beras selalu menjadi isu yang menarik untuk diperhatikan dan didiskusikan baik karena relevansinya dengan kepentingan rakyat Indonesia maupun dalam perspektif pasar dunia. Beras merupakan bahan pangan utama mayoritas rakyat Indonesia, dan golongan masyarakat berpendapatan rendah membelanjakan lebih kurang sepertiga dari pendapatan mereka untuk membeli beras (Pranolo, 2000).. Beras masih tetap dianggap sebagai komoditi strategis dan kekurangan produksi beras akan mudah menjadi masalah sosial politik, ekonomi dan keamanan. Konsekuensinya pemerintah harus tanggap terhadap parameter yang berhubungan dengan penawaran, permintaan dan stok beras.

Dengan mengetahui jumlah permintaan (konsumsi) dan jumlah penawaran serta stok yang tersedia, maka pemerintah dapat memantau, menjaga ketersediaan beras agar stabilitas harga terjamin. Dengan adanya perhatian yang serius terhadap ketiga parameter tersebut, diharapkan tidak akan terjadi gejolak harga di pasar yang akan meresahkan masyarakat, baik bagi petani produsen maupun masyarakat konsumen. Fokus perhatian dititik beratkan kepada seberapa banyak produksi yang dihasilkan oleh petani, dan berapa yang terserap oleh pasar dibeli oleh konsumen, sehingga pada akhirnya pemerintah dapat mengambil kebijakan apakah melakukan pembelian beras kepada petani guna menghindari kelebihan penawaran (*excess supply*) yang disimpan sebagai stok atau sebaliknya pemerintah mengeluarkan stok

manakala terjadi kekurangan beras di pasar guna menghindari kelebihan permintaan (*excess demand*).

Pangan seperti beras, merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang paling hakiki dan pemenuhan akan kebutuhannya merupakan hak azasi setiap orang, dengan demikian pangan bagi penduduk harus tersedia setiap saat di mana saja orang membutuhkannya. Menurut Sawit (2004), beras masih memegang peranan penting sebagai pangan utama rakyat Indonesia, diperkirakan kontribusinya antara 40% sampai 80% dari kebutuhan kalori masyarakat, beras juga menjadi sumber pendapatan bagi sebagian besar petani kecil di Indonesia, diperkirakan 2/3 (dua pertiga) lahan pertanian dialokasikan untuk tanaman padi. Dengan demikian ketahanan pangan menjadi hal yang sangat penting.

Ketersediaan beras sebagai bahan pangan yang cukup bermutu dengan harga yang terjangkau merupakan bahagian dari ketahanan pangan. Dalam konteks ini terdapat aspek penawaran yang mencakup tingkat produksi dan distribusi, aspek daya beli masyarakat yang dapat dilihat dari tingkat pendapatan masyarakat konsumen, serta aspek aksesibilitas setiap orang terhadap pangan yang mencakup tentang hal yang berkaitan dengan keterbukaan dan kesempatan masyarakat mendapatkan pangan dengan mudah.

Permasalahan yang menyangkut tentang beras saat ini merupakan permasalahan yang sangat kompleks terutama sejak pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak, yang berdampak pada naiknya harga sejumlah komoditi termasuk beras, semetara daya beli masyarakat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah yang merupakan mayoritas rakyat Indonesia menurun drastis. Peranan

pemerintah dengan lembaga penyangga seperti Bulog atau Dolog, sebenarnya bertujuan untuk memantau, menjaga dan menstabilkan harga dan pasokan beras di pasar ternyata belum mampu berperan secara signifikan sejak berubahnya status Bulog dari lembaga pemerintah non departemen menjadi perusahaan umum. Dalam hal ini salah satu fasilitas yang selama ini dinikmati oleh Bulog dicabut, yaitu Bulog tidak lagi memperoleh dana murah berupa kredit likuidasi Bank Indonesia untuk menjalankan tugasnya tetapi harus menggunakan dana mahal berupa kredit komersial. Padahal selama ini dana yang dibutuhkan oleh Bulog untuk melakukan pengelolaan cadangan beras sangat besar.

Salah satu hal penting dalam pengelolaan beras nasional adalah mengetahui tingkat penawaran, permintaan dan stok beras sehingga tidak ada kelangkaan maupun surplus beras yang berlebihan dipasaran yang pada akhirnya merugikan masyarakat sebagai konsumen dan petani sebagai produsen beras. Pada tingkat yang diinginkan akan tercapai harga beras yang layak dan mampu dijangkau oleh masyarakat dan menguntungkan para petani sebagai produsen (Arief, 2002). Mengingat pentingnya beras ini, pemerintah menekankan pada pengembangan produksi beras, yang tercermin dari berbagai intervensi kebijakan yang selama ini dilakukan. Beberapa kebijakan yang penting diantaranya adalah penergetan luas tanam, kebijaksanaan harga dengan menggunakan stok penyangga, subsidi sarana produksi pertanian, serta pengembangan institusional (Sawit 2003).

Persoalan klasik pada komoditas beras berpangkal pada adanya dua tujuan yang harus dicapai sekaligus dan terkadang keduanya cenderung bertolak belakang, yaitu mempertahankan harga yang baik di tingkat produsen namun pada saat yang sama juga tidak terlalu memberatkan konsumen. Sebagai barang konsumsi yang diproduksi di dalam negeri dengan melibatkan banyak petani, opsi kebijakan komoditas beras seharusnya mencakup dua sisi sekaligus. Kepentingan petani produsen beras seharusnya mendapatkan perhatian yang sangat besar dibandingkan kepentingan konsumen beras, meskipun secara statistik populasi kelompok konsumen lebih besar. Akan tetapi pada kenyataannya selama ini menunjukkan bahwa kebijakan harga beras yang dilakukan oleh pemerintah selalu berorientasi kepada konsumen. Dalam hal ini kebijakan tersebut bertujuan menjamin kecukupan persediaan pada tingkat harga yang terjangkau konsumen.

Salah satu sasaran pembangunan pangan adalah terwujudnya ketahanan pangan (*food security*). Ketahanan pangan ini dapat ditandai dengan tersedianya pangan yang cukup untuk penduduk, serta tersedia pula komoditi pangan selain beras. Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan yang kokoh, harus dipenuhi indikator-indikator berikut yaitu; ketersediaan pangan (*food availability*), keterjangkauan pangan (*food accessibility*), diterimanya pangan oleh konsumen (*consumer acceptability*), keamanan pangan (*food safety*), dan kesejahteraan masyarakat (*welfare*). Ketersediaan pangan yang cukup seperti yang dimaksudkan di atas, dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu sisi produksi, konsumsi dan sisi stok (Sawit, 2003).

Bila dilihat kondisi perekonomian Provinsi Sumatera Utara, sektor pertanian mempunyai peranan yang sangat strategis dalam menunjang pembangunan ekonomi daerah ini. Kontribusi sektor pertanian masih tetap sebagai penyumbang PDRB yang terbesar yakni 24,94 persen pada tahun 2003 dan penyerap tenaga kerja disektor ini menurut hasil Sakerda Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2003 sebesar 46,03 persen. Tujuan pembangunan di sektor pertanian selain untuk meningkatkan produksi juga untuk meningkatkan kesejahteraan rumah tangga petani.

Menurut data yang dikeluarkan oleh BPS (2006), jumlah petani produsen beras di Sumatera Utara sebanyak 598.700 rumah tangga, dengan jumlah produksi padi sawah dan ladang sebesar 3.007.636 ton dengan perincian produksi padi sawah sebanyak 2.870.944 ton dan padi ladang sebanyak 136.692 ton, dengan jumlah luas lahan pertanian sebesar 705.023 ha yang terdiri dari lahan sawah sebesar 652.531 ha dan luas ladang sebesar 52.492 ha yang tersebar di 26 kabupaten/kota. Rata-rata luas kepemilikan lahan pertanian sebesar 1,18 ha per rumah tangga pertanian, dengan rata-rata jumlah produksi per ha sebanyak 42,66 kw/ha atau sebesar 4.266 kg/ha.

Tabel 1. Luas Panen, Produksi dan Rata-rata Produksi Padi sawah dan ladang di Sumatera Utara Tahun 1997-2010

Tahun	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Rata-rata Produksi (Kg/Ha)
1997	797.545	3.212.208	4.028
1998	823.749	3.219.434	3.908
1999	838.626	3.354.730	4.000
2000	847.610	3.514.253	4.146
2001	801.948	3.291.515	4.104
2002	765.161	3.153.305	4.121
2003	825.188	3.403.075	4.124
2004	826.091	3.418.782	4.139
2005	822.073	3.447.393	4.194
2006	705.023	3.007.636	4.266
2007	768.173	3.257.823	4.241
2008	793.537	3.340.794	4.210
2009	841.539	3.576.543	4.250
2010	800.836	3.423.578	4.275

Sumber : BPS, Sumatera Utara dalam angka beberapa penerbitan (2010)

Perkembangan luas panen dan produksi padi di Sumatera Utara selama tahun 1997 sampai 2010 dapat dilihat pada Tabel 1 Produksi Padi Sumatera Utara selama periode 1997 sampai 2010 rata-rata mengalami peningkatan 0,38 persen per tahun. Peningkatan ini disumbangkan oleh produksi padi sawah yang rata-rata tumbuh per tahun sebesar 0,29 persen, sedangkan produksi padi ladang mengalami peningkatan rata-rata 1,24 persen. Jika dirinci menurut kabupaten/kota, Kabupaten Labuhan Batu dan Simalungun merupakan pusat produksi padi di Sumatera Utara. Pada tahun 2005 produksi padi Kabupaten Labuhan Batu mencapai 385.179 ton atau sebesar 11,17 persen dari total produksi padi Sumatera Utara, sementara produksi padi di

Kabupaten Simalungun pada tahun yang sama mencapai 381.858 ton atau 11,08 persen dari total produksi padi Sumatera Utara.

Tabel 2. Perkembangan Harga beras, Harga Gabah, dan Konsumsi beras perkapita di Provinsi Sumatera Utara Tahun 1997-2010

Tahun	Harga Beras (Rp/kg)	Harga Gabah (Rp/kg)	Konsumsi Perkapita (kg/th)
1997	1.025	463	150.2
1998	2.742	468	150.6
1999	2.843	1.148	151.2
2000	3.288	1.150	151.1
2001	2.592	1.144	151.3
2002	3.829	1.230	151.7
2003	3.612	1.374	151.6
2004	3.765	1.419	151.8
2005	4.262	1.765	152.0
2006	5.245	1.576	151.9
2007	6.055	1.850	151.8
2008	5.729	1.700	151.2
2009	6.793	2.250	152.0
2010	6.900	2.750	151.5

Sumber : BPS, Sumatera Utara dalam angka beberapa penerbitan (2010)

Walaupun produksi beras dari tahun ketahun mengalami kenaikan, namun akhir-akhir ini telah terjadi kelangkaan beras di sebagian wilayah Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan posisi stok beras nasional yang harus menjadi perhatian Bulog sebagai lembaga penyangga.

Kabupaten Simalungun pada tahun yang sama mencapai 381.858 ton atau 11,08 persen dari total produksi padi Sumatera Utara.

Tabel 2. Perkembangan Harga beras, Harga Gabah, dan Konsumsi beras perkapita di Provinsi Sumatera Utara Tahun 1997-2010

Tahun	Harga Beras (Rp/kg)	Harga Gabah (Rp/kg)	Konsumsi Perkapita (kg/th)
1997	1.025	463	150.2
1998	2.742	468	150.6
1999	2.843	1.148	151.2
2000	3.288	1.150	151.1
2001	2.592	1.144	151.3
2002	3.829	1.230	151.7
2003	3.612	1.374	151.6
2004	3.765	1.419	151.8
2005	4.262	1.765	152.0
2006	5.245	1.576	151.9
2007	6.055	1.850	151.8
2008	5.729	1.700	151.2
2009	6.793	2.250	152.0
2010	6.900	2.750	151.5

Sumber : BPS, Sumatera Utara dalam angka beberapa penerbitan (2010)

Walaupun produksi beras dari tahun ketahun mengalami kenaikan, namun akhir-akhir ini telah terjadi kelangkaan beras di sebagian wilayah Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan posisi stok beras nasional yang harus menjadi perhatian Bulog sebagai lembaga penyanggah.

Hal ini terjadi akibat adanya penambahan jumlah penduduk yang menyebabkan terjadinya peningkatan konsumsi beras yang tidak dapat diimbangi oleh peningkatan produksi beras secara nasional. Pada saat kondisi yang demikian peranan lembaga penyangga akan sangat menentukan dalam menstabilkan harga di pasar, karena pada saat terjadi defisit antara kebutuhan dan produksi maka yang terjadi adalah kenaikan harga yang akan memberatkan masyarakat khususnya masyarakat menengah ke bawah.

Sekalipun harga gabah kering giling (GKG) dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, seperti yang ditunjukkan dalam Tabel 2, namun kenaikan tersebut masih sangat jauh dari harapan para petani. Dengan luas lahan yang sempit, ditambah dengan naiknya biaya hidup dan harga input yang harus dibeli secara tunai, menyebabkan harga gabah yang sudah di atas biaya produksi menjadi tidak bermakna banyak bagi petani kecil. Dilain pihak kenaikan harga beras di pasar sangat tinggi, dalam beberapa tahun terakhir kenaikannya sangat signifikan dibanding dengan kenaikan harga gabah.

Petani selalu dirundung duka yang repetitif dan pemerintah masih mengalami kesulitan dalam memecahkannya. Dimana harga komoditas hasil pertanian selalu murah dimusim panen dan walaupun ada kenaikan disaat paceklik. Namun mereka sudah tidak memiliki stok, dan secara otomatis berubah peran dari peran produsen menjadi konsumen. Para petani memiliki posisi tawar rendah, karena sangat terbatasnya akses pasar dan informasi, kurang didukung akses permodalan, dan risiko kredit yang tinggi, ditambah lagi pada kondisi tersebut petani memerlukan dana segar

sehingga terpaksa harus menjual hasil panennya kepada pengijon, penebas dan pengepul, karena pihak pebisnis ini mampu menyediakan dana segar dan nihil birokrasi.

Para analis umumnya lebih peduli terhadap dimensi dinamis dari disparitas harga gabah dan harga beras tersebut karena sebelum tahun 1998 marjin harga gabah dan harga beras hanya berkisar Rp 400,- per kg. Kini marjin harga tersebut telah berada di atas Rp 1.500,- per kg, bahkan lebih besar untuk daerah terpencil. Jika diperhitungkan faktor inflasi dan upah buruh tani periode 1993-2006, disparitas harga itu bahkan menunjukkan kesenjangan yang lebih buruk. Artinya, nilai tambah pengolahan dan perdagangan beras tidak dinikmati petani dan konsumen, tetapi lebih banyak oleh pedagang, pihak penggilingan padi dan pelaku lain, termasuk Perum Bulog yang memperoleh penugasan pemerintah untuk menjaga stok pangan nasional. Implikasi berikutnya adalah sistim pascapanen dan distribusi beras di dalam negeri tidak efisien dan menyisakan fenomena asimetri pasar yang menjadi kendala serius pembangunan ekonomi (Arifin, 2006).

Disparitas harga gabah dan harga beras yang semakin melebar sejak kejatuhan Presiden Soeharto menjadi persoalan tersendiri bagi ekonomi perberasan, disamping dimensi politiknya yang juga semakin hangat. Laporan Badan Pusat Statistik 1 Februari 2006 memperlihatkan bahwa harga rata-rata gabah kering panen di tingkat petani bulan Januari 2006 tercatat Rp 1.990,- per kg. Harga rata-rata beras kualitas medium di seluruh Indonesia Rp 3.615,- per kg, dengan variasi yang cukup tajam,

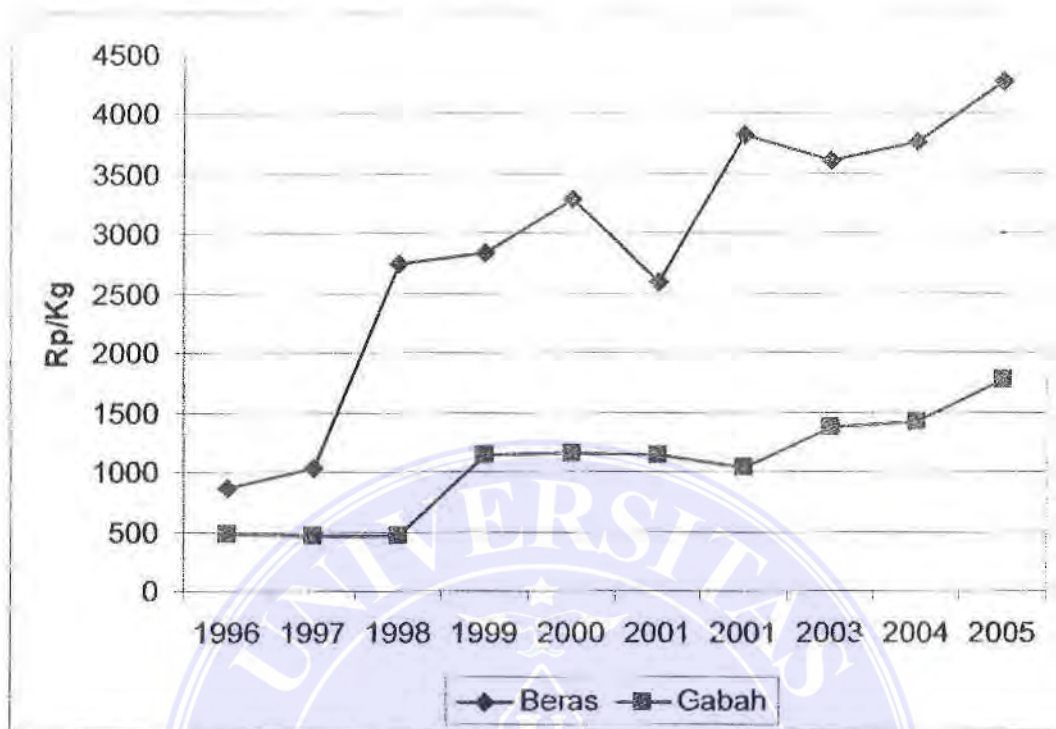
antara Rp 3.500,- per kg dan Rp 4.200,- per kg, atau bahkan lebih tinggi lagi di daerah pedalaman dan yang terisolasi.

Keterkaitan harga produksi pertanian di tingkat konsumen dan di tingkat produsen (petani) bersifat asimetri. Ini berarti peningkatan harga beras di tingkat konsumen ditransmisikan tidak sempurna dan lambat ke harga gabah di tingkat petani. Sedangkan penurunan harga beras di tingkat konsumen ditransmisikan sempurna dan cepat ke harga gabah di tingkat petani. Sebaliknya, peningkatan harga gabah di tingkat petani ditransmisikan dengan sempurna dan cepat ke harga beras di tingkat konsumen, sedangkan penurunan harga gabah di tingkat petani ditransmisikan dengan tidak sempurna dan lambat ke harga beras di tingkat konsumen. Artinya, fluktuasi harga beras atau gabah cenderung merugikan petani dan konsumen. Kalau pun ada manfaatnya, hal itu dinikmati pedagang dan penggilingan padi. Mereka inilah yang menikmati disparitas harga gabah dan beras tersebut. Dengan kata lain, pasar gabah dan beras kita semakin jauh dari sempurna. Struktur pasar seperti itu bersifat tidak adil dan sangat merugikan petani. Di sisi lain, pedagang dan pengusaha penggilingan padi, termasuk Perum Bulog yang mendapat tugas untuk menstabilkan harga, berpotensi meraup untung besar. Itu berarti, risiko usaha tani padi semakin besar.

Dengan anggapan seperti di atas, tidaklah terlalu mengherankan ketika kebijakan baru, Inpres No 2 tahun 2005, hanya menetapkan kenaikan harga referensi pembelian pemerintah menjadi Rp 1.330 per kilogram. Terlebih lagi, harga referensi itu dalam Inpres tersebut ternyata telah diubah dari penyerahan di sawah menjadi

penyerahan di penggilingan padi, sesuatu yang sulit dipahami. Apabila para perumus kebijakan memahami dengan baik bahwa tidak banyak petani Indonesia yang membawa sendiri hasil panennya ke penggilingan, melainkan telah dibeli para pedagang pengumpul semenjak padi masih hijau berada di sawah rasanya terlalu sulit untuk menetapkan kebijakan seperti itu (Arifin, 2004).

Kalaupun terjadi kenaikan harga beras tidak selalu menguntungkan petani, karena harga beras tidak berkorelasi langsung dengan harga gabah. Sebaliknya, jika harga gabah turun harga gabah selalu berkorelasi langsung dengan harga beras. Sebagai contoh dalam bulan Desember 2006 yang lalu harga beras naik lebih dari Rp 1.000,- per kilogram ternyata tidak diikuti oleh kenaikan harga gabah (tetap stabil semenjak bulan Mei 2006 di kisaran Rp 2.300 per kilogram), sementara itu petani padi di Indonesia umumnya menjual gabah, karena tidak memiliki modal yang cukup maupun sumber daya untuk memproduksi beras melalui penggilingan padi



Gambar 1. Grafik Perkembangan Harga Beras dan Harga Gabah di Provinsi Sumatera Utara Tahun 1996 – 2005

Disparitas harga gabah dan harga beras yang semakin melebar sejak tahun 1998 seperti yang disajikan pada Gambar 1, dari gambar tersebut dapat kita lihat bahwa pada tahun 2000 misalnya harga beras mencapai Rp 3.288 per kg, sedangkan harga gabah hanya sebesar Rp 1.150 per kg dengan selisih harga mencapai Rp 2.138 per kgnya. Memasuki tahun 2005 disparitas tersebut semakin tinggi, dimana harga beras yang naik begitu besar hingga mencapai angka Rp 4.265 per kg, atau naik sebesar 30 persen dari harga beras tahun 2000, sedangkan harga gabah untuk periode yang sama hanya sebesar Rp 1.765 per kg dengan selisih harga mencapai angka Rp 2.497 per kg melebihi selisih harga tahun 2000.

Kian melebarnya disparitas harga gabah dan harga beras tersebut disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya : (1) lemahnya posisi tawar petani dalam perdagangan gabah karena surplus jual umumnya rendah, kemampuan menyimpan gabah yang rendah dan tingginya desakan kebutuhan akan likuiditas, (2) nilai tambah pengolahan dan perdagangan beras tidak dinikmati petani atau konsumen, tetapi lebih banyak oleh pedagang, pihak penggiling padi dan pelaku lain, termasuk Perum Bulog yang memperoleh penugasan pemerintah untuk menjaga stok pangan nasional, (3) struktur pasar beras semakin tidak sehat dan masih jauh dari tingkat persaingan sempurna, dan (4) sistem pasca panen dan distribusi beras di dalam negeri tidak efisien dan menyisakan fenomena asimetris pasar yang menjadi kendala serius pembangunan ekonomi (Jamal, 2006).

Harga gabah ditingkat petani merosot pada periode musim panen raya dan meningkat setelahnya, dan harga paling tinggi pada priode musim paceklik. Hal ini berulang dengan pola yang mirip dari tahun ke tahun. Perbedaan harga antar musim telah memberi insentif kepada pedagang swasta, penggiling padi, koperasi dan lain-lain untuk turut serta dalam perdagangan, penyimpanan dan penggilingan padi yang jumlahnya begitu banyak baik berskala kecil maupun yang besar terlibat dalam aktivitas ekonomi tersebut. Artinya apabila margin harga musiman ini kecil apalagi hilang, maka hampir semua aktivitas tersebut akan terhenti, dan akan berdampak buruk terhadap kesempatan kerja, kemiskinan, pendapatan serta distribusinya, dan berpengaruh negatif terhadap ketahanan pangan rumah tangga (Sawit, 2003).

Dalam hukum ekonomi, harga merupakan indikator penting tingkat ketersediaan suatu barang. Dengan asumsi jumlah permintaan tetap, semakin banyak barang tersedia di pasar maka harga akan semakin murah. Begitu juga dengan komoditi beras, yang terjadi akhir-akhir ini adalah perkembangan tingkat harga yang sangat cepat. Sejak November 2006 hingga pertengahan Februari 2007 harga beras kelas medium naik dari Rp 4.400 menjadi Rp 5.800 per kg. Kenaikan harga ini terjadi di hampir semua pasar di Indonesia, tak terkecuali daerah produsen beras. Hal ini menguatkan indikasi kekurangan suplai beras di pasar. Pada sisi lain stok yang dimiliki pemerintah pun masih terbatas karena stok tahun lalu sebagian besar sudah digunakan untuk Raskin (Pelitasari, 2007). Namun kenaikan harga beras tersebut tidak dengan segera diikuti oleh kenaikan harga gabah di tingkat petani, walaupun terjadi kenaikan jumlahnya relatif kecil bila dibandingkan dengan kenaikan harga beras, dengan kata lain tidak dapat dipungkiri lagi bahwa disparitas harga beras dan harga gabah akan semakin melebar.

1.2. Perumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang penelitian tersebut di atas, penulis mencoba mengungkapkan pokok permasalahan yang berhubungan dengan masalah perberasan yaitu:

- a. Bagaimana pengaruh perubahan harga beras, harga barang substitusi, pendapatan masyarakat, jumlah penduduk dan permintaan beras tahun sebelumnya terhadap fungsi permintaan beras.

- b. Bagaimana pengaruh perubahan harga beras, harga barang substitusi, harga pupuk, dan penawaran beras tahun sebelumnya terhadap fungsi penawaran beras.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah disebutkan di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

- a. Pengaruh perubahan harga beras, harga barang substitusi, pendapatan masyarakat, jumlah penduduk dan permintaan beras tahun sebelumnya terhadap fungsi permintaan beras.
- b. Pengaruh perubahan harga beras, harga barang substitusi, harga pupuk, dan penawaran beras tahun sebelumnya terhadap fungsi penawaran beras.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dan relevansinya dengan perumusan masalah serta tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Memberi kontribusi ilmiah terhadap literatur ekonomi pertanian, khususnya yang menyangkut model komoditi pertanian yang bersifat dinamis.
- b. Memberikan informasi kepada pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara tentang kondisi perberasan, yang menyangkut tentang fluktuasi harga, tingkat produksi, konsumsi beras selama ini, sebagai langkah pengambilan keputusan di masa yang akan datang, yang berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan para petani sebagai produsen beras serta masyarakat umum sebagai konsumen.

1.4. Hipotesis

- a. Pengaruh harga beras terhadap permintaan beras adalah negatif, sedangkan pengaruh harga barang substitusi, jumlah penduduk, permintaan beras tahun sebelumnya dan pendapatan terhadap permintaan beras adalah positif.
- b. Pengaruh harga beras, harga barang substitusi dan penawaran beras tahun sebelumnya terhadap penawaran beras adalah positif, sedangkan pengaruh harga input (pupuk) terhadap penawaran beras adalah negatif



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Penawaran

Penawaran menunjukkan jumlah produk yang seorang produsen inginkan dan sanggup untuk menghasilkan dan menjualnya pada berbagai kemungkinan harga dari produk tersebut dalam waktu tertentu. Penawaran suatu produk oleh seorang produsen pada prinsipnya diperoleh dari perilaku produsen dalam menghadapi pasar. Fungsi penawaran ini dapat diderivasi dari perilaku produsen dalam proses memaksimalkan laba.

Untuk melihat perilaku produsen dalam merespon perubahan harga yang terjadi, diukur dengan konsep elastisitas. Secara umum elastisitas penawaran dirumuskan sebagai persentase perubahan kuantitas yang ditawarkan dibagi dengan persentase perubahan harga, yang dapat ditulis sebagai berikut:

$$E = \frac{\Delta Q / Q}{\Delta P / P}$$

Karena hasil-hasil produk pertanian bersifat musiman, maka faktor waktu pada fungsi penawaran memegang peranan penting. Suatu kenaikan harga di pasar tidak dapat segera diikuti dengan naiknya penawaran kalau memang panen belum tiba. Ini berarti bahwa elastisitas harga atas penawaran bersifat inelastis dalam jangka pendek (Joelson, 2003).

Dari segi penawaran terdapat dua faktor variabel strategis yang dapat diharapkan agar Indonesia lepas dari lonjakan harga beras yang tinggi ini. Pertama adalah dengan menambah jumlah areal lahan pertanian yang dapat dimiliki oleh para produsen petani kelas gurem. Program ini dapat dilakukan dengan upaya pemerintah membeli dan mengelola lahan areal produktif pertanian yang diperuntukan untuk menanam padi. Pengelolannya dapat dilimpahkan melalui koperasi pertanian desa dengan prioritas penyaluran kepada para petani padi skala usaha kecil. Pelaksanaan program ini diharapkan dapat meningkatkan stabilitas produksi beras nasional, sekaligus meningkatkan taraf hidup para petani miskin pedesaan (Chandra, 2006).

Harga komoditi beras di pasar tanpa adanya gangguan yang dicetus oleh kekuatan permintaan (*demand*) atau kekuatan penawaran (*supply*) seharusnya tidak akan begitu fluktuatif. Hal ini beralasan secara teoritis, mengingat karakter elastisitas harga dari komoditi strategis ini yang inelastis. Artinya, seberapa besarpun penurunan tingkat harga beras di pasar, pengaruhnya tidak akan diikuti oleh persentase kenaikan yang linear (dalam jumlah yang sama) dari volume pembelian beras yang dilakukan oleh kalangan konsumen rumah tangga. Walaupun anggota rumah tangga memperlakukan komoditi ini sebagai “barang kebutuhan pokok”, mereka tidak akan mengkonsumsinya dalam jumlah yang lebih banyak jika harga komoditi tersebut mengalami penurunan, sebaliknya juga walaupun harga mengalami kenaikan, jumlah yang sama masih tetap harus dikonsumsi (Chandra, 2006).

Stabilitas harga beras di pasar akan terselenggara dengan berjalannya mekanisme pasar dari kekuatan permintaan dan kekuatan penawaran. Dalam komoditi beras, keseimbangan harga perlu ditinjau dalam periode 1 sampai 2 tahun, kekuatan penawaran akan lebih banyak mendominasi kemungkinan anomali perubahan harga beras di luar jalur normal. Kekacauan harga pasar beras di Indonesia baru-baru ini lebih disebabkan oleh kurangnya pasokan dari para pedagang grosir dan produsen petani kaya (Pelitasari, 2007). Apalagi dengan adanya kekosongan persediaan beras pada tingkat yang aman di gudang-gudang persediaan Bulog maka lonjakan harga cukup tinggi di pasar dapat terjadi kapan saja.

Menurut Soekartawi (2002), ada beberapa faktor paling dominan yang mempengaruhi penawaran produk pertanian

1. Teknologi

Dengan adanya perbaikan teknologi, misalnya penggunaan teknologi yang baru sebagai pengganti teknologi yang lama, maka produksi akan semakin meningkat. Tentu saja penggunaan teknologi ini mungkin memerlukan biaya produksi yang relatif tinggi, beban resiko dan ketidakpastian juga relatif tinggi, memerlukan keterampilan khusus, dan lain sebagainya, namun bila semua keterbatasan ini dapat diatasi, maka produksi akan semakin meningkat, dengan demikian akan terjadi "*Upward shift of production*", yaitu fungsi produksi yang berubah kearah atas karena adanya penggunaan teknologi baru tersebut.

2. Harga input

Besar kecilnya harga input juga akan mempengaruhi besar kecilnya jumlah input yang dipakai. Bila harga faktor produksi turun, maka petani cenderung akan membelinya pada jumlah yang relatif besar. Dengan demikian, dari penggunaan faktor produksi yang biasanya dalam jumlah yang terbatas, maka dengan adanya tambahan penggunaan faktor produksi (sebagai akibat dari turunnya harga faktor produksi), maka produksi akan meningkat.

3. Harga produksi yang lain

Yang dimaksud sebagai harga produksi yang lain ini adalah adanya perubahan harga produksi alternatif. Pengaruh perubahan harga produksi alternatif ini, akan menyebabkan terjadinya jumlah produksi yang semakin meningkat atau sebaliknya semakin menurun. Misalnya, petani yang sudah terbiasa mengusahakan tanaman kedele dan jagung dalam suatu lahan tertentu, karena petani ini mempunyai anggapan bahwa harga jagung baik pada masa panen yang lalu dan juga dimasa mendatang cenderung menurun, maka ia mengambil keputusan untuk lebih banyak menanam kedele daripada jagung.

4. Jumlah produsen

Seringkali karena adanya rangsangan harga untuk komoditi pertanian tertentu, maka petani cenderung untuk mengusahakan tanaman tersebut. Misalnya, dari yang semula produsen tanaman sayur-sayuran kemudian karena harga tanaman cengkeh cukup tinggi, maka ia berubah dari petani sayur ke petani cengkeh. Dengan kata lain, dengan bertambahnya produsen tanaman cengkeh, maka produksi atau barang yang ditawarkan menjadi bertambah.

5. Harapan produsen terhadap harga produksi di masa mendatang

Seringkali juga ditemukan suatu peristiwa petani meramal besaran harga dimasa mendatang, apakah harga suatu komoditi naik atau turun. Hal ini disebabkan karena pengalaman yang mereka punyai selama beberapa tahun mengusahakan komoditi tersebut.

6. Elastisitas produksi

Perubahan besaran elastisitas juga mempengaruhi besaran penawaran. Seringkali ditemui bahwa elastisitas produksi untuk produksi hasil pertanian yang tidak elastis, sementara elastisitas produksi untuk satu komoditi tertentu lebih elastis yang disebabkan oleh karena keterbatasan faktor produksi. Begitupula waktu yang diperlukan untuk melakukan penyesuaian berproduksi sebagai akibat adanya rangsangan harga, memerlukan waktu. Hal ini disebabkan bukan saja karena faktor ekonomis seperti tersedianya faktor produksi, tetapi juga disebabkan karena adanya penyesuaian perubahan faktor biologi dan ekologi tanaman dari semula yang diusahakan tidak intensif menjadi sangat intensif, atau dari semula yang diusahakan dalam skala sempit, kemudian diubah menjadi skala luas.

2.2. Teori Permintaan

Pada prinsipnya semua hal yang terdapat pada permintaan terdapat pula pada penawaran dan elastisitas penawaran juga dihitung dengan cara yang sama. Elastisitas harga atas penawaran adalah nol bila kurva penawaran merupakan garis vertikal (harga tidak berpengaruh pada jumlah yang ditawarkan), dan tak terhingga bila kurva penawaran berbentuk garis horizontal yang berarti bahwa jumlah yang ditawarkan tidak terbatas pada harga tertentu. Walaupun banyak persamaan dalam penaksiran

angka-angka elastisitas, namun ada dua perbedaan penting antara kurva permintaan dan penawaran, yang pertama adalah pentingnya faktor waktu dalam hal penawaran, sedangkan yang kedua erat hubungannya dengan pertama adalah bahwa pengaruh harga terhadap jumlah yang ditawarkan biasanya tidak dapat dibalikkan (Indarwati, 1997).

Faktor waktu dalam kurva penawaran penting sekali karena hasil-hasil pertanian bersifat musiman sehingga suatu kenaikan harga di pasar tidak dapat segera diikuti dengan naiknya penawaran kalau memang panen belum tiba. Ini berarti elastisitas harga atas penawaran adalah inelastis dalam jangka pendek. Disamping itu pengaruh harga tidak dapat dibalikkan karena kalau kenaikan harga setelah beberapa waktu tertentu mendorong kenaikan jumlah yang ditawarkan maka penurunan harga tidak akan dapat mengembalikan jumlah yang ditawarkan ke tingkat sebelumnya. Investasi-investasi yang sudah ditanam pada bidang pertanian berupa dam dan saluran-saluran irigasi, pembukaan lahan baru dan lainnya tidak akan dapat ditarik kembali segera setelah harga komoditi turun (Mubyarto, 1987).

Jumlah permintaan konsumen terhadap suatu komoditi tertentu tergantung dari harga komoditi yang bersangkutan, harga komoditi lainnya, tingkat pendapatan, jumlah penduduk, komposisi umur, selera dan daerah (Maharyana, 1988). Konsumen biasanya dihadapkan pada berbagai kemungkinan kombinasi barang dan jasa yang akan dikonsumsinya. Masing-masing kombinasi akan memberikan kepuasan yang berbeda. Karena konsumen bersifat rasional maka kombinasi barang dan jasa yang dipilih sudah barang tentu yang akan memberikan kepuasan tertinggi berdasarkan pendapatannya dan tingkat harga yang berlaku atas barang dan jasa tersebut.

Sebagaimana fungsi penawaran yang telah dijelaskan sebelumnya, fungsi permintaan untuk komoditi pertanian juga memasukkan dan mengakomodasikan unsur waktu kedalam model, yang disebut model permintaan dinamis. Model permintaan dinamis mempunyai asumsi bahwa perilaku konsumen pada saat sekarang dipengaruhi oleh perilaku konsumen pada masa yang lalu. Model dinamis yang biasa digunakan dalam studi empiris terdiri dari model permintaan dinamis, penyesuaian stok dan model dinamis penyesuaian keadaan (Swastika, 1999).

Dalam jangka panjang, kekuatan permintaan akan mempengaruhi keseimbangan harga yang ada. Kekuatan permintaan ini dapat muncul akibat kenaikan konsumsi konsumen rumah tangga dan konsumen kelembagaan. Kenaikan harga di pasar yang terdorong dari kenaikan permintaan alamiah (misalnya, akibat kenaikan jumlah anggota rumah tangga) tidak akan meningkat sedrastis dibandingkan dengan dampak kekuatan yang dipicu oleh kekurangan pasokan beras di pasar bebas. Anomali dari segi permintaan akan terjadi jika pada satu saat tertentu terjadi kepanikan konsumen, seperti misalnya akibat dari peristiwa kerusuhan sosial menyusul kejatuhan Pemerintahan Orde Baru (Sawit, 2004).

Faktor-faktor penentu pergerakan kegiatan permintaan beras di masyarakat cukup banyak, akan tetapi faktor-faktor berikut paling tidak sudah merupakan alasan bagi pemicu kenaikan volume permintaan konsumsi beras di pasar (Chandra, 2006).

1. Tingkat pendapatan

Tingkat pendapatan konsumen sudah pasti akan mempengaruhi pola permintaan dan reaksi yang diberikan apabila terjadi lonjakan harga. Rumah tangga konsumen berpendapatan rendah akan sangat sensitif atas perkembangan harga terendah dari jenis beras IR-64. Keluarga miskin dengan 4 sampai dengan 6 anak akan menghabiskan 2 kg beras dalam satu harinya; sehingga setiap hari pada masa stabil ibu rumah tangga tersebut harus menyediakan dana Rp 8.000 per hari jika harga beras per kg nya sebesar Rp 4.000,-. Saat ini dengan harga yang membumbung tinggi menjadi Rp 5.000 per kg, keluarga ini harus menyisihkan anggaran belanja rumah tangga yang sangat terbatas sejumlah Rp 10.000 per harinya, atau Rp 300.000 per bulan hanya untuk beras saja. Dengan pendapatan rumah tangga sebesar Rp 650.000 per bulan maka taraf hidup mereka tetap rendah.

Beralasanlah jika kelompok keluarga miskin yang jumlahnya jutaan orang di Indonesia mendambakan stabilitas harga beras. Karena keterbatasan pendapatan, dan elastisitas harga yang dimiliki keluarga miskin cenderung lebih elastis dibandingkan dengan kelompok rumah tangga lainnya. Sedangkan sensitifitas harga bagi konsumen lembaga dan konsumen lainnya diperkirakan tidak banyak terpengaruh.

2. Jumlah penduduk

Pertambahan jumlah penduduk satu wilayah dapat mempengaruhi pola kebutuhan konsumsi beras di daerah tersebut. Dalam kaitan ini, pertambahan jumlah penduduk (secara alamiah) baru akan memberikan pengaruhnya pada peningkatan konsumsi beras dalam jangka panjang. Sedangkan pengaruh yang cukup tinggi dan

segera akan dirasakan apabila wilayah tadi menerima kiriman pendatang para pekerja migran yang cukup besar jumlahnya.

3. Selera konsumen

Selera konsumen sangat berpengaruh pada jenis beras yang dikonsumsi, terutama yang terjadi pada kelompok rumah tangga masyarakat berpendapatan rendah dan kelompok rumah tangga kaya. Kelompok rumah tangga berpendapatan rendah akan mengkonsumsi beras jenis kualitas sedang, yang harganya pun relatif lebih tinggi dibandingkan dengan jenis kualitas rendah.

Tidaklah mengherankan apabila toko supermarket menjual berbagai jenis beras dengan perbedaan yang mencolok untuk kualitas yang dijualnya. Dengan rentang perbedaan harga sebanyak dua kali lipat dari harga beras raskin IR-64, masih ada saja kelompok konsumen perkotaan yang mampu dan tidak mengurangi konsumsi beras kualitas mewahnya yang tersedia di pasaran.

2.3. Penelitian Sebelumnya

Studi empiris yang dilakukan oleh Nuryanti (2005) yang berjudul Analisa keseimbangan sistim penawaran dan permintaan beras di Indonesia menyimpulkan bahwa dalam jangka pendek dan jangka panjang kenaikan harga beras akan meningkatkan penawaran beras, dengan menggunakan model keseimbangan *Cobweb*. Pengaruh kenaikan harga pupuk urea dalam jangka pendek akan menurunkan penawaran beras, sementara dalam jangka panjang akan meningkatkan penawaran beras serta menurunkan harga beras.

Pengaruh peningkatan pendapatan per kapita dalam jangka pendek akan meningkatkan permintaan beras, dan dalam jangka panjang tidak mengakibatkan perubahan permintaan dan harga beras. Sementara itu peningkatan jumlah penduduk dalam jangka pendek dan jangka panjang akan menyebabkan peningkatan permintaan dan harga beras dengan pengaruh yang lebih besar daripada pengaruh peningkatan pendapatan per kapita terhadap permintaan dan harga beras.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Taupiq (1996), tentang analisis permintaan dan penawaran beras, dengan menggunakan model *rational expectation* dan *Nerlove Adjustment*. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa respon penawaran beras terhadap ekspektasi harga adalah positif, sedangkan terhadap harga barang substitusi dan harga input negatif. Elastisitas jangka pendek dan jangka panjang adalah relatif sama dan bersifat inelastis. Respon permintaan beras terhadap harga beras dan dummy selera terhadap barang lain adalah negatif, sedangkan terhadap harga barang substitusi dan pendapatan adalah positif. Elastisitas permintaan jangka pendek dan jangka panjang bersifat inelastis. Respon stok beras terhadap harga beras adalah negatif, sedangkan terhadap impor beras dan jumlah penduduk adalah positif. Elastis jangka pendek relatif lebih besar dibanding elastisitas jangka panjang akan tetapi sama-sama bersifat inelastis.

Sementara itu Cahyono (1985), melakukan studi respon beras di Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta dan Jawa Timur. Studinya menghasilkan elastisitas harga pada areal tanaman dan produksi per hektar yang positif, kecuali Kalimantan Barat, elastisitas harga di Jawa lebih tinggi dibanding dengan di luar Jawa.

Menurut Swastika (1999) yang melakukan penelitian dengan judul Penerapan model dinamis dalam sistim penawaran dan permintaan beras di Indonesia, menyimpulkan bahwa kenaikan harga dasar gabah sebagai refleksi dari kenaikan harga beras sebesar 10 persen mengakibatkan menurunnya produksi sebesar 1,3 persen. Sedangkan kenaikan harga pupuk sebesar 10 persen akan menurunkan penawaran beras sebesar 0,3 persen baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Sementara itu keseimbangan sistim penawaran dan permintaan beras di Indonesia adalah stabil. Ini berarti bahwa pengaruh kebijaksanaan harga setelah mengalami perubahan jangka pendek pada akhirnya akan kembali ke keseimbangan semula.

Menurut Amang (2001), dalam studinya berjudul kebijakan beras dan pangan nasional, kebijakan harga dasar (*floor price*) dimaksudkan untuk melindungi petani dan harga tertinggi (*ceiling price*) untuk membantu konsumen yang berlaku sejak 1969 hingga 1997, disamping untuk mengendalikan inflasi melalui stabilisasi harga. Sementara itu Nainggolan (1987), yang melakukan penelitian berjudul *supply response for rice in Java*, menyimpulkan bahwa harga beras tidak berpengaruh nyata terhadap perluasan areal tanaman, tetapi berpengaruh nyata terhadap produksi per hektar. Pengaruh harga terhadap areal tanaman dan produksi per hektar adalah positif.

Menurut Jamal (2006) dalam penelitiannya berjudul analisis kebijakan penentuan harga pembelian gabah menyimpulkan bahwa hasil analisis korelasi harga menunjukkan bahwa di tingkat nasional terdapat keterkaitannya yang relatif kuat antara harga gabah di tingkat produsen dengan harga beras di tingkat konsumen/eceran (koefisien korelasi 0,72836). Nilai koefisien korelasi juga

menunjukkan bahwa keterkaitan harga grosir dengan eceran jauh lebih kuat dibandingkan dengan keterkaitan harga produsen dengan grosir, baik di tingkat nasional maupun provinsi.

Sementara itu Arief (2002), mencoba membuat model simulasi penyediaan kebutuhan beras nasional, menyimpulkan bahwa dari hasil simulasi terlihat bahwa sampai dengan tahun 2004 tidak terjadi defisit dalam sistem perberasan nasional. Tetapi kenyataannya dalam beberapa tahun terakhir kita telah melakukan impor beras untuk mencukupi kebutuhan beras nasional. Kondisi ini tidak sesuai dengan prediksi yang dilakukan dengan simulasi karena beberapa faktor yaitu : (a) model dibangun hanya dengan menggunakan dua parameter yaitu persentase pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan luas panen, (b) dengan dua parameter tersebut model yang dibangun memiliki pertumbuhan eksponensial tanpa adanya kondisi equilibrium. Dengan memasukkan parameter-parameter tambahan (faktor kekeringan, serangan hama dan lain-lain) model yang dibangun akan memberikan hasil yang mendekati kondisi nyata.

BAB III BAHAN METODE PENELITIAN

3.1. Bentuk Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, menganalisis persoalan perberasan yang menyangkut tentang permintaan dan penawaran beras, di Provinsi Sumatera Utara.

3.2. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah seluruh Kabupaten dan Kota yang ada di Sumatera Utara, dalam rentang waktu penelitian ini 15 tahun yaitu sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 2010.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, dengan runtun waktu (*time series*) yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara dan Bulog Divisi Regional Sumatera Utara serta dilengkapi dengan studi kepustakaan.

3.4. Dfinisi Konsep Dan Dfinisi Operasional

Guna mencapai tujuan keseragaman penafsiran atas variabel-variabel yang diteliti serta ukuran yang digunakan dalam analisis, maka pada bagian ini perlu dijelaskan variabel-variabel yang berhubungan dengan permasalahan. Pada dasarnya variabel-variabel ini diturunkan dari teori dan studi-studi sebelumnya yang telah diuraikan di muka, dan diberi makna sebagai berikut :

- a. Penawaran beras, merupakan jumlah produksi beras selama satu tahun

- b. Permintaan beras, merupakan proksi dari jumlah konsumsi beras penduduk per kapita selama satu tahun.
- c. Harga gabah, merupakan harga gabah kering giling yang merupakan harga jual produsen padi.
- d. Harga beras, merupakan harga eceran rata-rata beras kelas medium yang berlaku di pasar.
- e. Harga pupuk, merupakan harga rata-rata pupuk urea yang ditetapkan oleh pemerintah.
- f. Harga barang substitusi, merupakan harga dari barang yang dapat menggantikan fungsi dari komoditi beras, dalam penelitian ini dipakai harga komoditi Terigu.
- g. Pendapatan penduduk, dalam penelitian ini diwakili oleh pendapatan domestik regional bruto (PDRB) per kapita Provinsi Sumatera Utara.
- h. Jumlah penduduk, adalah jumlah penduduk Sumatera Utara secara total

3.5. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis sejauh mana masing-masing variabel bebas terhadap permintaan dan penawaran beras di Sumatera Utara digunakan alat analisis regresi linier berganda yang dilakukan untuk menguji apakah masing-masing variabel bebas memberikan pengaruh terhadap variabel tidak bebas, dengan menggunakan bantuan program *shazam*.

Adapun model yang akan dianalisis adalah sebagai berikut :

3.5.1. Fungsi Permintaan

Fungsi permintaan beras diasumsikan merupakan fungsi dari: *Pertama* harga beras, merupakan harga beras yang berlaku di pasar. Berfluktuasinya harga beras di pasar akan berpengaruh pada permintaan terhadap beras itu sendiri, besar kecilnya respon perubahan harga ini tergantung dari elastisitas harga atas permintaan. *Kedua* harga barang substitusi. Harga barang substitusi dapat mempengaruhi permintaan, secara umum penurunan harga barang substitusi akan menurunkan permintaan terhadap beras. *Ketiga* pendapatan masyarakat. Pendapatan masyarakat merupakan faktor yang sangat penting di dalam menentukan corak permintaan, naik turunnya pendapatan akan mengakibatkan perubahnya permintaan. Perubahan permintaan tersebut tergantung kepada jenis barangnya apakah barang inferior, barang esensial, barang normal atau barang mewah. *Keempat* jumlah penduduk. Jumlah penduduk juga sangat berpengaruh terhadap permintaan beras, dimana seiring dengan penambahan jumlah penduduk sudah barang tentu dengan sendirinya akan meningkatkan permintaan beras untuk di konsumsi. Secara matematis formulasinya adalah :

$$QD_t = b_0 + b_1P_t + b_2PS_t + b_3Y_t + PD_t + QD_{t-1} + \mu_t \dots\dots\dots 1$$

Dengan:

QD_t = Permintaan beras tahun t

P_t = Harga beras

Y = Pendapatan, yang diwakili oleh PDRB

PD = Jumlah penduduk

QD_{t-1} = Permintaan tahun sebelumnya

β = Koefisien penyesuaian

3.5.2. Fungsi Penawaran

Fungsi penawaran beras di sini adalah merupakan fungsi penawaran beras yang diinginkan (*desired*), dalam hal ini diasumsikan penawaran beras merupakan fungsi dari: *Pertama* harga beras, *Kedua* harga barang substitusi, yang dimaksud sebagai harga barang substitusi adalah adanya perubahan harga produk alternatif. Pengaruh perubahan harga produk alternatif ini akan menyebabkan terjadinya perubahan jumlah penawaran beras apakah meningkat atau menurun, tergantung kepada harga dari produk pengganti tersebut. Dalam penelitian ini diambil harga Terigu sebagai harga dari barang substitusi. *Ketiga* harga pupuk. Diantara input utama di sektor pertanian, pupuk merupakan input yang sangat penting dalam rangka meningkatkan produksi pertanian. Besar kecilnya harga input (pupuk) juga akan mempengaruhi besar kecilnya jumlah input yang dipakai, yang pada gilirannya akan mempengaruhi tingkat produksi. Secara matematis formulasinya adalah :

$$QS_t = a_0 + a_1P_t + a_2PS_t + a_3PP_t + QS_{t-1} + \mu_t \dots\dots\dots 2$$

dengan :

QS_t = Penawaran beras

QS_t = Penawaran beras tahun t

QS_{t-1} = Penawaran beras tahun sebelumnya

P_t = Harga beras

PS_t = Harga barang substitusi (Terigu)

PP_t = Harga input (pupuk urea)

α = Koefisien penyesuaian



BAB IV GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN

4.1. Gambaran umum

Provinsi Sumatera Utara terletak pada 1° - 4° Lintang Utara dan 98° - 100° Bujur Timur, Luas daratan Provinsi Sumatera Utara 71.680 km².

Sumatra Utara pada dasarnya dapat dibagi atas:

- a. Pesisir Timur
- b. Pegunungan Bukit Barisan
- c. Pesisir Barat
- d. Kepulauan Nias

Pesisir timur merupakan wilayah di dalam provinsi yang paling pesat perkembangannya karena persyaratan infrastruktur yang relatif lebih lengkap daripada wilayah lainnya. Wilayah pesisir timur juga merupakan wilayah yang relatif padat konsentrasi penduduknya dibandingkan wilayah lainnya. Pada masa kolonial Hindia-Belanda, wilayah ini termasuk residentie Sumatra's Oostkust bersama provinsi Riau. Di wilayah tengah provinsi berjajar Pegunungan Bukit Barisan. Di pegunungan ini terdapat beberapa wilayah yang menjadi kantong-kantong konsentrasi penduduk. Daerah di sekitar Danau Toba dan Pulau Samosir, merupakan daerah padat penduduk yang menggantungkan hidupnya kepada danau ini.

Pesisir barat merupakan wilayah yang cukup sempit, dengan komposisi penduduk yang terdiri dari masyarakat Batak, Minangkabau, dan Aceh. Namun secara kultur dan etnolinguistik, wilayah ini masuk ke dalam budaya dan Bahasa

Minangkabau. Terdapat 419 pulau di propinsi Sumatera Utara. Pulau-pulau terluar adalah pulau Simuk (kepulauan Nias), dan pulau Berhala di selat Sumatera (Malaka).

Kepulauan Nias terdiri dari pulau Nias sebagai pulau utama dan pulau-pulau kecil lain di sekitarnya. Kepulauan Nias terletak di lepas pantai pesisir barat di Samudera Hindia. Pusat pemerintahan terletak di Gunung Sitoli. Kepulauan Batu terdiri dari 51 pulau dengan 4 pulau besar: Sibulasi, Pini, Tanahbala, Tanahmasa. Pusat pemerintahan di Pulautele di pulau Sibulasi. Kepulauan Batu terletak di tenggara kepulauan Nias.

Pulau-pulau lain di Sumatera Utara: Imanna, Pasu, Bawa, Hamutaia, Batumakalele, Lego, Masa, Bau, Simaleh, Makole, Jake, dan Sigata, Wunga.

Di Sumatera Utara saat ini terdapat dua taman nasional, yakni Taman Nasional Gunung Leuser dan Taman Nasional Batang Gadis. Menurut Keputusan Menteri Kehutanan, Nomor 44 Tahun 2005, luas hutan di Sumatera Utara saat ini 3.742.120 hektare (ha). Yang terdiri dari Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam seluas 477.070 ha, Hutan Lindung 1.297.330 ha, Hutan Produksi Terbatas 879.270 ha, Hutan Produksi Tetap 1.035.690 ha dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi seluas 52.760 ha. Namun angka ini sifatnya secara de jure saja. Sebab secara de facto, hutan yang ada tidak seluas itu lagi. Terjadi banyak kerusakan akibat perambahan dan pembalakan liar. Sejauh ini, sudah 206.000 ha lebih hutan di Sumut telah mengalami perubahan fungsi. Telah berubah menjadi lahan perkebunan, transmigrasi. Dari luas tersebut, sebanyak 163.000 ha untuk areal perkebunan dan 42.900 ha untuk areal transmigrasi.

Pusat pemerintahan Sumatera Utara terletak di kota Medan. Sebelumnya, Sumatera Utara termasuk ke dalam Provinsi Sumatra sesaat Indonesia merdeka pada tahun 1945. Tahun 1950, Provinsi Sumatera Utara dibentuk yang meliputi eks karesidenan Sumatera Timur, Tapanuli, dan Aceh. Tahun 1956, Aceh memisahkan diri menjadi Daerah Istimewa Aceh. Sumatera Utara dibagi kepada 25 kabupaten, 8 kota (dahulu kotamadya), 325 kecamatan, dan 5.456 kelurahan/desa.

4.2. Lokasi Penelitian

Sumatera Utara merupakan provinsi keempat terbesar jumlah penduduknya di Indonesia setelah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Menurut hasil pencacahan lengkap Sensus Penduduk (SP) 1990, penduduk Sumatera Utara berjumlah 10,81 juta jiwa, dan pada tahun 2010 jumlah penduduk Sumatera Utara telah meningkat menjadi 12,98 juta jiwa. Kepadatan penduduk Sumatera Utara pada tahun 1990 adalah 143 jiwa per km² dan pada tahun 2010 meningkat menjadi 178 jiwa per km². Kadar Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Sumatera Utara setiap tahunnya tidak tetap. Pada tahun 2000 TPAK di daerah ini sebesar 57,34 persen, tahun 2001 naik menjadi 57,70 persen, tahun 2002 naik lagi menjadi 69,45 persen.

Sumatera Utara merupakan provinsi multietnis dengan Batak, Nias, dan Melayu sebagai penduduk asli wilayah ini. Daerah pesisir timur Sumatera Utara, pada umumnya dihuni oleh orang-orang Melayu. Pantai barat dari Barus hingga Natal, banyak bermukim orang Minangkabau. Wilayah tengah sekitar Danau Toba, banyak dihuni oleh Suku Batak yang sebagian besar beragama Kristen. Suku Nias berada di kepulauan sebelah barat. Sejak dibukanya perkebunan tembakau di Sumatera Timur, pemerintah kolonial Hindia Belanda banyak mendatangkan kuli kontrak yang

dipekerjakan di perkebunan. Pendatang tersebut kebanyakan berasal dari etnis Jawa dan Tionghoa. Pusat penyebaran suku-suku di Sumatera Utara, sebagai berikut :

- a. Suku Melayu : Pesisir Timur, terutama di kabupaten Deli Serdang, Serdang Bedagai, dan Langkat
- b. Suku Batak Karo : Kabupaten Karo
- c. Suku Batak Toba : Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Samsir, Kabupaten Toba Samsir
- d. Suku Batak Mandailing : Kabupaten Mandailing Natal
- e. Suku Batak Angkola : Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kabupaten Padang Lawas
- f. Suku Batak Simalungun : Kabupaten Simalungun
- g. Suku Batak Pakpak : Kabupaten Dairi dan Kabupaten Pakpak Barat
- h. Suku Nias : Pulau Nias
- i. Suku Minangkabau : Kota Medan, Kabupaten Batubara, Pesisir barat
- j. Suku Aceh : Kota Medan
- k. Suku Jawa : Pesisir timur
- l. Suku Tionghoa : Perkotaan pesisir timur & barat.

Provinsi ini tersohor karena luas perkebunannya, hingga kini, perkebunan tetap menjadi primadona perekonomian provinsi. Perkebunan tersebut dikelola oleh perusahaan swasta maupun negara. BUMN Perkebunan yang arealnya terdapat di Sumatera Utara, antara lain PT Perkebunan Nusantara II (PTPN II), PTPN III dan PTPN IV. Selain itu Sumatera Utara juga tersohor karena luas perkebunannya. Hingga kini, perkebunan tetap menjadi primadona perekonomian provinsi.

Perkebunan tersebut dikelola oleh perusahaan swasta maupun negara. Sumatera Utara menghasilkan karet, coklat, teh, kelapa sawit, kopi, cengkeh, kelapa, kayu manis, dan tembakau. Perkebunan tersebut tersebar di Deli Serdang, Langkat, Simalungun, Asahan, Labuhanbatu, dan Tapanuli Selatan.

- a. Luas pertanian padi. Pada tahun 2005 luas areal panen tinggal 807.302 hektare, atau turun sekitar 16.906 hektare dibanding luas tahun 2004 yang mencapai 824.208 hektare. Produktivitas tanaman padi tahun 2005 sudah bisa ditingkatkan menjadi berkisar 43,49 kwintal perhektar dari tahun 2004 yang masih 43,13 kwintal per hektare, dan tanaman padi ladang menjadi 26,26 kwintal dari 24,73 kwintal per hektare. Tahun 2005, surplus beras di Sumatera Utara mencapai 429 ton dari sekitar 2.1.27 juta ton total produksi beras di daerah ini.
- b. Luas perkebunan karet. Tahun 2002 luas areal tanaman karet di Sumut 489.491 hektare dengan produksi 443.743 ton. Sementara tahun 2005, luas areal karet menurun atau tinggal 477.000 hektare dengan produksi yang juga anjlok menjadi hanya 392.000 ton.
- c. Irigasi. Luas irigasi teknis seluruhnya di Sumatera Utara seluas 132.254 ha meliputi 174 Daerah Irigasi. Sebanyak 96.823 ha pada 7 Daerah Irigasi mengalami kerusakan sangat kritis.
- d. Produk Pertanian. Sumatra Utara menghasilkan karet, coklat, teh, kelapa sawit, kopi, cengkeh, kelapa, kayu manis, dan tembakau. Perkebunan tersebut tersebar di Deli Serdang, Langkat, Simalungun, Asahan, Labuhanbatu, dan Tapanuli Selatan. Komoditas tersebut telah diekspor ke berbagai negara dan

memberikan sumbangan devisa yang sangat besar bagi Indonesia. Selain komoditas perkebunan, Sumatera Utara juga dikenal sebagai penghasil komoditas hortikultura (sayur-mayur dan buah-buahan); misalnya Jeruk Medan, Jambu Deli, Sayur Kol, Tomat, Kentang, dan Wortel yang dihasilkan oleh Kabupaten Karo, Simalungun dan Tapanuli Utara. Produk hortikultura tersebut telah diekspor ke Malaysia dan Singapura.

Kinerja ekspor Sumatera Utara cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2004 tercatat perolehan devisa mencapai US\$4,24 milyar atau naik 57,72% dari tahun sebelumnya dari sektor ini. Ekspor kopi dari Sumatera Utara mencapai rekor tertinggi 46.290 ton dengan negara tujuan ekspor utama Jepang selama lima tahun terakhir. Ekspor kopi Sumut juga tercatat sebagai 10 besar produk ekspor tertinggi dengan nilai US\$3,25 juta atau 47.200,8 ton periode Januari hingga Oktober 2005. Dari sektor garmen, ekspor garmen cenderung turun pada Januari 2006. Hasil industri khusus pakaian jadi turun 42,59 persen dari US\$ 1.066.124 pada tahun 2005, menjadi US\$ 2.053 pada tahun 2006 pada bulan yang sama.

Kinerja ekspor impor beberapa hasil industri menunjukkan penurunan. Yakni furniture turun 22,83 persen dari US\$ 558.363 (2005) menjadi US\$ 202.630 (2006), plywood turun 24,07 persen dari US\$ 19.771 menjadi US\$ 8.237, misteric acid turun 27,89 persen yakni dari US\$ 115.362 menjadi US\$ 291.201, stearic acid turun 27,04 persen dari US\$ 792.910 menjadi US\$ 308.020, dan sabun noodles turun 26 persen dari AS.689.025 menjadi US\$ 248.053.

Kinerja ekspor impor hasil pertanian juga mengalami penurunan yakni minyak atsiri turun 18 persen dari US\$ 162.234 menjadi US\$ 773.023, hasil

laut/udang, minyak kelapa dan kopi robusta juga mengalami penurunan cukup drastis hingga mencapai 97 persen. Beberapa komoditi yang mengalami kenaikan (nilai di atas US\$ Juta) adalah biji kakao, hortikultura, kopi arabica, CPO, karet alam, hasil laut (non udang). Untuk hasil industri yakni moulding, ban kendaraan dan sarung tangan karet.



BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian ini, yang didukung oleh pendapat para ahli, dan temuan baik secara kuantitatif maupun kualitatif, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Perubahan pendapatan dan perubahan jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap permintaan beras, temuan ini nyata secara statistik, sedangkan harga beras, harga barang substitusi dan permintaan beras tahun sebelumnya tidak berkorelasi terhadap permintaan beras. Perubahan pendapatan dan harga beras adalah inelastis terhadap permintaan beras. Hal ini bermakna perubahan pendapatan dan harga beras pengaruhnya kurang proporsional terhadap perubahan permintaan beras, sedangkan perubahan jumlah penduduk elastis terhadap permintaan beras.
- b. Perubahan harga beras berpengaruh positif, sedangkan harga pupuk berpengaruh negatif terhadap jumlah beras yang ditawarkan, temuan ini adalah nyata secara statistik. Dilain pihak harga barang substitusi dan penawaran beras tahun sebelumnya tidak berkorelasi terhadap penawaran beras. Kondisi ini mencerminkan bahwa masyarakat Sumatera Utara tidak lazim mengkonsumsi terigu sebagai bahan pembuat roti sebagai pengganti makanan pokok. Dalam jangka pendek penawaran terhadap beras bersifat inelastis, karena hasil-hasil produk pertanian termasuk beras bersifat musiman, dan memerlukan tenggang waktu (*gestation period*) antara menanam dengan memanen, suatu kenaikan

harga di pasar tidak dapat segera diikuti dengan naiknya penawaran kalau memang panen belum tiba.

6.2. Saran

- a. Dari sisi permintaan, karena respon variabel harga beras terhadap permintaan beras bersifat inelastis, dan perubahan harga tidak akan banyak berpengaruh kepada besar kecilnya konsumsi beras maka untuk melindungi masyarakat sebagai **konsumen** dan petani sebagai produsen beras, maka pemerintah diharapkan dapat mengontrol dengan baik disparitas harga gabah dengan harga beras yang selama ini terlalu melebar, serta interval antara harga dasar dengan harga atap harus terus diperbaharui sesuai dengan perkembangan harga komoditi lainnya.
- b. Dari sisi penawaran beras, karena respon harga, baik harga beras maupun harga input terhadap penawaran beras yang bersifat inelastis, dan karena variabel harga merupakan variabel yang sulit dikendalikan oleh petani selaku produsen yang disebabkan karena sering lemahnya posisi petani dalam *bargaining position*, petani hanya menerima besaran harga, maka untuk merangsang petani agar dapat meningkatkan produksinya, sangat diperlukan kebijaksanaan bukan harga dari pemerintah, misalnya berupa infrastruktur seperti pembuatan jalan pedesaan, prasarana angkutan hasil pertanian, pembangunan irigasi, serta meningkatkan penyuluhan terhadap para petani secara berkelanjutan.

- c. Berkaitan dengan konflik kepentingan antara konsumen dan produsen dalam konteks harga beras, dimana harga yang rendah bagi konsumen memiliki arti positif karena meningkatkan daya beli, sedangkan bagi produsen memiliki arti negatif karena menurunkan pendapatan dan sekaligus daya beli, demikian juga sebaliknya apabila harga tinggi memiliki arti negatif bagi konsumen dan positif bagi produsen. Untuk itu dibutuhkan manajemen stok yang mampu menciptakan stabilitas harga dengan karakteristik di satu sisi tidak memberatkan konsumen namun disisi lain masih menguntungkan produsen. Instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah dalam hal ini adalah kombinasi manajemen stok dengan penetapan harga dasar gabah (*floor price*) dan penetapan harga atap (*ceiling price*) yang wajar baik untuk kepentingan produsen maupun kepentingan konsumen.
- d. Untuk jangka panjang upaya pengurangan ketergantungan terhadap beras perlu dipikirkan dengan penetapan komoditas alternatif secara jelas, sehingga kebijakan pengembangan komoditas alternatif ini dapat ditingkatkan. Selain membuka lapangan kerja dengan memberdayakan masyarakat semaksimal mungkin, diversifikasi pangan merupakan satu solusi yang tepat untuk mengatasi kekurangan beras yang berkesinambungan di masa yang akan datang. Peningkatan suplai pangan dengan dukungan produksi dan produktivitas masih mutlak diperlukan untuk memenuhi permintaan bahan pangan yang masih tinggi. Di sini, Perum Bulog juga perlu didorong untuk dapat berperan dalam produksi beras secara komersial dan menguntungkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andyana, A Julin. (1993). Dampak Kebijakan Penghapusan Subsidi Sarana Produksi Terhadap Kerangka Usaha tani Padi di Jawa Tengah, Risalah Hasil Penelitian Sosial Ekonomi dan Pembangunan Puslitbangtan, Hal 59-173.
- Amang, B. dan M. H. Sawit. (2001). **Kebijakan Beras dan Pangan Nasional: Pelajaran Orde Baru dan Orde Reformasi**. (Edisi Kedua: Direvisi dan Diperluas). Bogor: Penerbit IPB Press,.
- Arief, RM. (2002). Model Simulasi Penyediaan Kebutuhan Beras Nasional, Tesis, Pengantar Falsafah Sains, IPB Bogor
- Arifin, B (2004). **Dekomposisi Pertumbuhan Pertanian Indonesia**. Makalah disampaikan pada Seminar Khusus Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, Badan Litbang Departemen Pertanian; Bogor.
-, (2006) Analisis Ekonomi, Ketidak Mampuan Bulog dalam Menstabilkan Harga Besar. Majalah Dewan Ekonomi; Jakarta
- Badan Pusat Statistik, (2003). **Analisis Kondisi Rumah Tangga Tani Menurut Beberapa Komoditi Penting**. Hasil Sensus Pertanian, BPS Sumatera Utara: Medan
-, (1985-2005). **Sumatera Utara Dalam Angka**, Publikasi oleh BPS, Sumatera Utara: Medan
- Bulog. (2004). **Bulog Baru Menyelaraskan Kegiatan dan Memantapkan Tugas Nasional**. Bulog: Jakarta.
- Cahyono, T.B. (1985). A Study of Rice Supply Responsiveness to Price and non price Factor in Indonesia, **Thesis**, University of Bangkok, Tidak dipublikasikan
- Chandra, Aditiawan, (2006). **Perubahan Paradigma Politik Ekonomi Beras**, Bulog tentang lingkungan bisnis di Indonesia.
- Darwanto, Dwidjono H. (2005). Ketahanan Pangan Berbasis Produksi dan Kesejahteraan Petani, **Jurnal Ilmu Pertanian** Vol 12 No.2, 2005 : 152 - 164
- Hermanto. (2004). Perspektif Implementasi Kebijakan Stabilisasi Harga Gabah/ Beras Pasca Bulog. **Lokakarya Ketahanan Pangan Pasca Bulog**. Badan Bimas Ketahanan Pangan, Departemen Pertanian, Jakarta, 22 November.
- , (2001). Kebijakan Harga Beras Periode Orba dan Reformasi, **Bunga Rampai Ekonomi Beras**, LPEM-UI, Jakarta
- Indarwati Sri M, (1997). Kebijakan Harga dan Ketahanan Pangan Nasional. **Majalah Ketahanan pangan** , Badan Urusan Logistik.
- Indiarto, Agsu Dwi. (2000). Analisis Faktor-faktor Produksi Padi di Asean Menggunakan Model Cobb Douglas. **Tesis**. Tidak dipublikasikan.

- Irawan Andi, (2006). **Integrasi Pasar Beras Indonesia, Working Paper**, Jakarta
- Jamal Erizal, dkk, (2006) **Analisis Kebijakan Penentuan Harga Pembelian Gabah**, Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Departemen Pertanian, Jakarta.
- Krisnamurthi B, (2003). **Perum Bulog dan Kebijakan Pangan Indonesia: Kenderaan Tanpa Tujuan**. Majalah Pangan Media Informasi dan Komunikasi Tahun 2006.
- Mubyarto, (1987). **Pengantar Ekonomi Pertanian**, LP3ES, Jakarta
- Nainggolan, K. Dan Ato Suprpto, (1987). **Supply Response For Rice In Java. Empirical Evidence**, *Majalah EKI*, Vol 35 No 2.
- Nurhayati S, (2005). **Analisis Keseimbangan sistim Penawaran Beras dan Permintaan Beras di Indonesia**. *Jurnal Agro Ekonomi*, Volume 23 No.1, Mei 2005
- Pelitasari Lely, (2007). **Impor dan OP Beras Cermin Kegagalan Swasembada Beras**, *Warta Intra Bulog*, No 3.XXXIII/Maret 2007
- Pranolo, Tito, (2000), **Peran Bulog Sebagai Lembaga Distribusi dan Cadangan Pangan Nasional**, *Round Table* Kebijaksanaan Harga Gabah, Deptan, Jakarta
- Ruky, I. Minaras, (1999), **Sistem Distribusi dan Pemasaran Pangan Nasional Dalam Era Pasar Bebas : Kasus Beras**, LPEM, UI, Jakarta
- Saliem, H. Purwati, dkk (2005). **Manajemen Ketahanan Pangan Era Otonomi Daerah dan Perum Bulog**, Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian.
- Saifullah, Agus. (2004), **Peran Bulog Dalam Kebijakan Perberasan Nasional**, World Bank, Jakarta.
- Sawit, M. Husein, (2003). **Pengadaan Gabah Bulog dan Lumbung Padi Masyarakat Desa (LPMD)**, *Majalah Pangan Media Komunikasi dan Informasi*, No. 40/XII/Januari2003.
-, (2004). **Kebijakan Stok dan Reserve Beras di Negara Asean+3**, *Majalah Pangan, Media informasi & Komunikasi* No:42/XIII/Januri 2004.
-, (2006). **Indonesia Dalam Tata Perubahan Perdagangan Beras Dunia**, *Majalah Pangan, Media Informasi & Komunikasi*, No 47/XIIIIV/Juli 2006
- Soekartawi, (2002). **Prinsip Dasar Ekonomi Pertanian, Teori dan Aplikasi**. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sudaryanto, Tahlim, (2001). **Perkembangan Industri Pupuk, Investasi irigasi, dan Konversi lahan**. *Bunga Rampai Ekonomi Beras*. LPEM-FEUI. Jakarta.
- Surnamo, (2006). **Priodisasi Musim Tanam Padi Sebagai Landasan Manajemen Beras Nasional**, Pusat Penelitian dan pengembanagan Tanaman Pangan, Sinar Tani Edisi 8-14

- Swastika. Dkk, (1999). Penerapan Model Dinamis Dalam Sistem Penawaran dan Permintaan Beras di Indonesia, **Informatika Pertanian** Vol 8 Desember 1999.
- Syafa'at, N. (2002). Padi dan Beras Sebagai Industri Kunci Pembangunan Pedesaan: Analisis Keterkaitan Antar Industri, **Laporan Penelitian untuk Bulog**: Maret, Jakarta.
- Taupiq, (1996). Analisis Permintaan Dan Penawaran Beras di Sumatera Selatan, Tesis, Program Pasca Sarjana Universitas Syiah Kuala, Tidak di publikasikan.

